

ABSTRAK

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanah dapat dinilai sebagai harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Tanah juga memiliki fungsi social yang apabila dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka pemiliknya harus menyerahkan dengan suka rela dengan mendapatkan ganti kerugian. Dalam hal ini tidak jarang pemilik tanah mendapatkan ganti rugi tidak sesuai dengan nilai tanah.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bentuk ganti atas tanah harus berdasarkan dan memperhatikan peraturan yang berlaku dan keseimbangan kepentingan para pihak demi terciptanya keadilan hukum. Persoalan yang menyangkut warga desa dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk memperoleh pemecahan yang tepat dan memuaskan bagi para pihak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharuskan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang sesuai dengan nilai tanah tersebut. Bentuk ganti rugi tidak terpaku pada tukar menukar tanah atau tanah pengganti melainkan dapat berupa uang, pemukiman, gabungan dari keduanya, atau bentuk lain yang disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Bentuk Dan Nilai Ganti Rugi.

ABSTRACT

Land has a very important meaning in human life because the land can be considered as assets that have fixed properties and can be reserved for life in the future. Land also has a social function which, if necessary for the public interest, then the owner must submit voluntarily to obtain damages. In this case it is not uncommon landowners received compensation does not match the value of the land.

This research was normative law by using an approach law (statute approach) to examine all laws and regulations relevant to the procurement of land for development in the public interest.

Changing the shape of the land should be based and the applicable regulations and the balance of interests of the parties for the creation of legal justice. The problems of the villagers and discussed in advance to obtain appropriate and satisfactory solution for the parties. Land acquisition for public purposes are required to provide compensation to the land owners in accordance with the value of the land. Restitution is not fixated on the exchange of land or other land but can be money, housing, a combination of both, or other form approved by the parties concerned.

Keywords : Land Acquisition, Form And Value Of Compensation.